

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstelasi politik global pada pertengahan abad ke-20 sangat ditentukan oleh Perang Dingin, sebuah pertarungan ideologis yang tajam antara Blok Barat yang kapitalis-liberal dipimpin oleh Amerika Serikat, melawan Blok Timur yang komunis-sosialis dipimpin oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Persaingan ini bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan benturan eksistensial antara dua paradigma kehidupan yang saling meniadakan. Dalam konteks ini, Asia Tenggara dipandang sebagai "papan catur" geopolitik yang paling krusial. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadi sasaran utama dalam strategi *containment policy* Barat. Doktrin Teori Domino yang diyakini oleh Washington menempatkan Indonesia sebagai kartu kunci; jika Indonesia jatuh ke pelukan komunisme, maka seluruh Asia Tenggara dianggap akan runtuh mengikuti jejaknya.

Di bawah Presiden Soekarno, Indonesia mencoba menavigasi persaingan ini dengan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Bagi Soekarno, Nasakom adalah upaya jenius untuk mempersatukan faksi-faksi besar yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Namun, di mata dunia internasional, Nasakom dianggap sebagai karpet merah bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguasai pemerintahan secara perlahan. Keberpihakan Soekarno pada Poros Jakarta-Peking dan retorika anti-imperialisme yang kental menciptakan kecemasan luar biasa di kalangan elit militer domestik dan aktor intelijen asing. Ketegangan ini menciptakan suasana "bom waktu" di mana setiap faksi politik, terutama Angkatan Darat dan PKI, berada dalam kondisi siaga tertinggi untuk saling menyingkirkan demi supremasi ideologis. Persaingan ini merembes hingga ke akar rumput, membagi masyarakat ke dalam kotak-kotak ideologis yang sangat militan.

Titik balik terjadi melalui peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang menjadi katalisator keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di bawah kepemimpinan militer, khususnya Jenderal Soeharto. Transisi kekuasaan ini tidak hanya bersifat politis-militer, tetapi juga merupakan sebuah pergeseran krusial dalam lanskap ideologi bangsa. Orde Baru yang lahir di tengah trauma nasional membutuhkan landasan legitimasi yang kuat untuk membenarkan tindakan pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya. Rezim ini menyadari bahwa untuk mengonsolidasi kekuasaan yang absolut, mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan senjata, tetapi juga legalitas hukum dan kontrol narasi yang tak terbohaykan guna memastikan keselarasan Indonesia dengan blok anti-komunis global serta memulihkan stabilitas ekonomi melalui bantuan Barat.

Memasuki kebutuhan akan landasan yuridis dan ideologis yang permanen inilah yang melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 (selanjutnya disebut TAP MPRS No. XXV/1966). Ketetapan ini tidak sekadar membubarkan PKI sebagai sebuah organisasi politik; lebih jauh lagi, ia menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketetapan ini menjadi instrumen hukum yang sangat unik dalam sejarah hukum Indonesia karena ia mengkriminalisasi "pikiran" dan "paham", bukan sekadar perbuatan fisik. Instrumen ini membatasi potensi pemikiran kritis di masa depan melalui ruang interpretasi yang sangat elastis oleh negara.

Masalah fundamental yang muncul dari pemberlakuan TAP MPRS No. XXV/1966 dan yang menjadi fokus kritik dalam penelitian ini adalah ketiadaan batasan operasional yang jelas mengenai tindakan apa yang secara sah dikategorikan sebagai "menyebarkan atau mengembangkan" paham tersebut. Dalam prinsip hukum pidana yang universal, sebuah norma harus memenuhi asas *lex certa* (aturan yang jelas) agar tidak memberikan ruang bagi kesewenang-wenangan. Namun, ketetapan ini justru hadir dengan definisi yang sangat kabur (*vague*). Tidak adanya parameter yang rigid mengenai sejauh mana sebuah pemikiran dianggap "berbahaya" memberikan mandat absolut kepada penguasa untuk menjadi penafsir tunggal kebenaran ideologis.

Ketidakjelasan ini menciptakan sebuah "pasal karet" yang multidimensi. Negara, melalui aparaturnya keamanan dan birokrasi, memiliki wewenang diskresi untuk melabeli segala bentuk kritik sosial atau oposisi politik sebagai manifestasi dari ajaran komunis. Sebagai contoh, advokasi mengenai keadilan agraria, pembelaan terhadap hak-hak buruh, atau tuntutan terhadap distribusi kekayaan yang lebih merata, seringkali secara simplistik dicap sebagai "komunis" atau "anti-Pancasila". Ketidakjelasan ini memungkinkan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap ide-ide yang sebenarnya sah dalam demokrasi, namun dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan Orde Baru. Dengan demikian, TAP MPRS No. XXV/1966 bukan sekadar instrumen hukum pembubaran partai, melainkan mekanisme kontrol pikiran yang memungkinkan negara menyingkirkan siapa pun yang berbeda pandangan hanya dengan memberikan label subversif.

Dalam perspektif teoritis, kehadiran dan penerapan TAP MPRS No. XXV/1966 dapat dianalisis menggunakan konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Bagi Gramsci, kekuasaan kelas penguasa tidak hanya dipertahankan melalui dominasi kekerasan atau paksaan fisik (represi), tetapi juga melalui hegemoni, yaitu kepemimpinan intelektual dan moral yang menciptakan konsensus di kalangan massa. Hegemoni bekerja dengan menanamkan cara pandang penguasa menjadi "akal sehat" (*common sense*) masyarakat melalui institusi pendidikan, media, dan hukum.

TAP MPRS No. XXV/1966 berfungsi sebagai instrumen legal-formal paling ampuh dalam membangun hegemoni Orde Baru tersebut. Melalui ketetapan ini, negara memonopoli tafsir atas Pancasila dan mendefinisikan batas-batas "kebenaran ideologis". Negara berhasil menanamkan persepsi kolektif bahwa pemikiran kritis yang menyerupai pola pikir kiri adalah ancaman eksistensial bagi keselamatan bangsa. Hal ini menciptakan kondisi di mana masyarakat melakukan sensor mandiri (*self-censorship*) karena takut akan stigma sosial dan hukum. Dominasi negara dalam menafsirkan ajaran terlarang secara absolut menjadikan hegemoni ini sangat efektif; oposisi tidak perlu selalu ditindak secara fisik, karena mereka telah lumpuh secara intelektual oleh ketakutan akan label "anti-Pancasila".

Dampak dari hegemoni anti-komunis yang dipaksakan lewat TAP MPRS ini ternyata jauh melampaui penghancuran gerakan komunis secara fisik, namun lebih dari itu menghancurkan Gerakan progresif lain yang mempunyai konsep dan arah perjuangan yang beririsan. Penelitian ini menyoroti sebuah konsekuensi krusial yang sering terabaikan: bagaimana ketetapan ini menciptakan efek pembekuan (*chilling effect*) terhadap kehidupan kepartaian secara menyeluruh. Sebelum 1965, partai politik di Indonesia adalah laboratorium gagasan yang hidup dengan warna ideologis yang sangat tegas. Nasionalis memiliki PNI, Islam memiliki Masyumi dan NU, Sosialis memiliki PSI, dan Komunis memiliki PKI. Spektrum ini menyediakan dialektika pemikiran yang sehat bagi kebijakan publik. Namun, pasca-berlakunya TAP MPRS No. XXV/1966, spektrum ini dipangkas secara paksa. Ada ketakutan massal bahwa menyuarakan isu keadilan sosial, hak buruh, atau pembelaan terhadap petani akan berujung pada pelabelan "komunis", "kiri", "subversif", atau "anti-Pancasila".

Ketakutan akan label subversif ini memaksa partai-partai politik non-komunis, seperti PNI dan partai-partai Islam, untuk melakukan "ototomi ideologis" memotong bagian dari prinsip perjuangan mereka sendiri agar bisa selamat dalam sistem Orde Baru. Terjadilah proses de-ideologisasi dan homogenisasi partai politik. Partai tidak lagi menjadi alat perjuangan gagasan yang distingtif, melainkan sekadar mesin pragmatis yang harus mendukung program "stabilitas dan pembangunan" yang didefinisikan secara tunggal oleh penguasa. PNI dipaksa meninggalkan elemen Marhaenisme yang radikal, sementara partai-partai Islam ditekan untuk tidak membawa agenda politik yang dianggap mengancam integritas negara. Fenomena ini kemudian mencapai titik kulminasinya pada kebijakan fusi partai pada tahun 1973 yang menyederhanakan partai menjadi hanya tiga kontestan, serta penerapan Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1985.

Meskipun banyak studi telah membahas sejarah pembubaran PKI atau kekerasan politik Orde Baru, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri. Kebanyakan studi fokus pada dampak fisik dan kemanusiaan, atau analisis makro-politik konsolidasi kekuasaan Soeharto. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menempatkan TAP MPRS No. XXV/1966 sebagai mekanisme kunci yang dianalisis melalui lensa hegemoni Gramsci yang secara sistematis menyebabkan hilangnya

orientasi ideologis partai-partai politik non-komunis. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan literatur dengan menjelaskan bagaimana sebuah instrumen hukum berhasil menciptakan "konsensus yang dipaksakan" (*coerced consensus*), yang mengubah partai politik dari agen ideologis menjadi sekadar aksesori dalam struktur kekuasaan yang hegemonik.

Warisan dari kebijakan ini masih terasa dalam pragmatisme politik Indonesia kontemporer. Hilangnya basis ideologis yang kuat membuat partai politik pasca-Reformasi cenderung memiliki platform yang serupa dan mudah melakukan koalisi tanpa landasan gagasan yang jelas. Memahami TAP MPRS No. XXV/1966, oleh karena itu, bukan sekadar urusan sejarah, melainkan upaya untuk mendiagnosis hilangnya politik berbasis gagasan di Indonesia. Berdasarkan seluruh uraian kompleksitas historis, yuridis, dan sosiopolitik tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini dalam penelitian berjudul: **"Dampak TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 terhadap Gerakan Kiri dan Hilangnya Orientasi Ideologis Partai Politik di Indonesia"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang telah diteliti adalah :

Bagaimana pemberlakuan TAP MPRS No. XXV/1966 pada masa awal orde baru menyebabkan hilangnya orientasi ideologis partai politik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis peran TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dalam membatasi ruang gerak ideologi kiri serta dampaknya terhadap perubahan orientasi ideologis partai-partai politik di Indonesia, khususnya melalui proses de-ideologisasi dan homogenisasi politik pada masa Orde Baru. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menegaskan posisi kebaruan ilmiah (*state of the art*) dengan menggunakan perspektif hegemoni Antonio Gramsci guna membedah TAP MPRS No. XXV/1966 bukan sekadar sebagai produk hukum statis, melainkan sebagai mekanisme hegemoni yang aktif mengonstruksi konsensus tunggal dan menyingkirkan dialektika ideologi dalam sistem kepartaian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang studi politik Indonesia, khususnya kajian tentang Orde Baru, gerakan kiri, politik ideologi, serta hubungan antara hukum dan kekuasaan. Dengan memberikan analisis historis-politis tentang peran TAP MPRS No. XXV/1966, penelitian ini memperkuat diskursus ilmiah

mengenai bagaimana kebijakan negara dapat membentuk dinamika ideologi dalam sistem kepartaian.

2. Selain itu, penelitian ini menyediakan kajian yang komprehensif mengenai mekanisme hegemoni negara melalui perspektif teori Gramsci, sehingga dapat menjadi rujukan penting bagi peneliti yang tertarik pada topik hegemoni, depolitisasi, de-ideologisasi, maupun studi kritis terhadap rezim politik di Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan teoretis dan empiris bagi studi lanjutan mengenai transformasi ideologi dan politik pasca-1965. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penggunaan pisau analisis Gramscian untuk melihat bagaimana sebuah instrumen hukum formal bekerja secara sosiopolitis dalam menciptakan "akal sehat" (*common sense*) anti-komunisme yang melumpuhkan basis ideologis partai politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan pemerhati politik mengenai bagaimana instrumen hukum seperti TAP MPRS No. XXV/1966 dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur kepartaian dan ruang kebebasan politik. Wawasan ini dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis pada masa kini.
2. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk memahami konteks historis dan politis dari hilangnya orientasi ideologis partai politik di Indonesia, serta bagaimana warisan kebijakan anti-komunisme masih memengaruhi perilaku politik kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan literasi politik publik, mendorong sikap kritis, dan memperkuat kesadaran akan pentingnya pluralisme ideologis dalam kehidupan demokrasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah proposal penelitian yang berfungsi untuk memperjelas landasan teoritis serta memetakan konteks empiris dari permasalahan yang dikaji. Bagian ini menyajikan uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, terutama terkait dinamika politik Indonesia pasca-1965, kebijakan anti-komunisme Orde Baru, serta perubahan orientasi partai politik sebagai dampaknya. Selain itu, tinjauan pustaka juga menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis utama, khususnya konsep hegemoni Antonio Gramsci yang akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana negara membangun dan mempertahankan dominasi ideologis melalui instrumen hukum seperti TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini belum pernah dipelajari secara spesifik dengan konteks dan fokus yang sama, serta untuk mengetahui lebih detail tentang posisi penelitian ini dalam lanskap akademik, peneliti merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini membantu memperkaya teori dan konsep yang digunakan, serta memberikan acuan yang jelas dan terarah dalam mengkaji fenomena yang diteliti.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	M. Khalil (2024)	Komunisme dalam Pandangan Muhammadiyah dan NU di Media Sosial: Tinjauan Hermeneutika Kritis Paul Ricoeur.	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi hegemoni anti-komunisme yang berpuncak pada TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 berhasil membentuk kesadaran publik yang langgeng terhadap narasi "bahaya laten kiri".	Menjelaskan akar historis dan ideologis yang menjadi dasar pembentukan hegemoni anti-kiri pasca-1966, yang menjadi penyebab utama hilangnya orientasi ideologis pada partai-partai politik.
2	Hidayat M. (2021)	Hegemoni Orde Baru terhadap Politik Identitas.	Kualitatif Historis.	Menjelaskan bahwa rezim pasca-1966 menggantikan pertarungan ideologi dengan kontrol identitas nasional berbasis stabilitas. Negara berperan aktif dalam	Mendukung argumen bahwa TAP MPRS No. XXV/1966 merupakan pintu masuk bagi hegemoni stabilitas yang berujung pada

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
				menyeragamkan cara pandang politik masyarakat.	depolitisasi ideologi di Indonesia.
3	F.F. Putra (2022)	Blok Pembangkang	Analisis Wacana Kritis (AWK).	Mengungkap peran negara dalam membentuk hegemoni sosial-politik pasca-TAP MPRS 1966 melalui kontrol ketat terhadap narasi ideologi dan pembatasan terhadap politik oposisi..	bagaimana hegemoni negara menggantikan pluralisme ideologi dengan konsensus "nasionalisme tunggal".
4	Budiawan (2004)	Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis Pasca-Soeharto	Analisis Wacana & Studi Sejarah	Orde Baru membangun narasi "bahaya laten" secara sistematis untuk melegitimasi stigma permanen terhadap gerakan kiri.	Menjadi rujukan dalam melihat bagaimana stigma "kiri" digunakan sebagai alat kontrol sosial.
5	M. Syafi'i Anwar (1995)	Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia di Masa Orde Baru	Kualitatif (Studi Tokoh & Dokumen)	Partai-partai Islam mengalami penyempitan ruang gerak politik hingga terpaksa menerima Asas	Memberikan data spesifik mengenai dampak de-ideologisasi pada

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
				Tunggal Pancasila.	kelompok partai Islam.
6	Asvi Warman Adam (2009)	Membongkar Manipulasi Sejarah Orde Baru	Historiografi (Kritis)	Terjadi monopoli tafsir sejarah oleh negara untuk memastikan legitimasi rezim militeristik Orde Baru.	Menjelaskan bagaimana negara memegang kendali atas narasi kebenaran ideologis nasional.
7	Eriyanto (2001)	Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media	Analisis Wacana Gramscian	Negara menggunakan bahasa dan instrumen hukum untuk menciptakan hegemoni, sehingga oposisi dianggap sebagai "musuh bersama".	Memberikan kerangka praktis penggunaan teori Gramsci dalam membedah teks hukum (TAP MPRS).
8	Herlambang P. Wiratraman (2014)	Tekanan terhadap Kebebasan Akademik di Indonesia	Yuridis-Antropologis	TAP MPRS No. XXV/1966 merupakan instrumen "pasal karet" yang membatasi ruang berpikir kritis di universitas dan organisasi.	Memperkuat argumen mengenai ketidakjelasan batasan operasional dalam TAP MPRS tersebut.

1.5.2 Kerangka Teori

Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)

Teori hegemoni yang diperkenalkan Antonio Gramsci berangkat dari pandangan bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga melalui kekuatan koersif (*coercion*), tetapi terutama melalui penciptaan persetujuan sosial (*consent*) di dalam masyarakat (Gramsci, 1971). Dalam kerangka ini, dominasi tidak semata diwujudkan lewat paksaan fisik atau hukum, melainkan melalui kontrol terhadap kesadaran dan nilai-nilai yang diterima masyarakat sebagai kebenaran umum (*common sense*). Hegemoni adalah kemampuan kelompok dominan untuk membentuk cara berpikir masyarakat sehingga pandangan dunia mereka diterima secara sukarela sebagai sesuatu yang alamiah. Dengan demikian, kekuasaan yang hegemonik adalah kekuasaan yang bekerja melalui kesadaran, bukan sekadar melalui paksaan.

Gramsci membedakan dua bentuk kekuasaan yang bekerja secara bersamaan: masyarakat politik dan masyarakat sipil. Masyarakat politik adalah ruang kekuasaan formal yang mencakup negara, aparat, hukum, dan militer alat-alat yang menjamin stabilitas melalui paksaan. Sementara itu, masyarakat sipil merupakan ruang ideologis tempat nilai, gagasan, dan kebiasaan sosial diproduksi serta disebarluaskan melalui lembaga seperti media massa, pendidikan, agama, dan budaya populer (Simon, 1991). Justru di ranah masyarakat sipil inilah hegemoni dibangun. Penguasa mempertahankan kekuasaan bukan hanya dengan mengontrol aparatur negara, tetapi dengan mengatur cara masyarakat memahami dan memaknai dunia. Dalam konteks Orde Baru, institusi pendidikan dan agama menjadi saluran hegemoni paling efektif untuk menormalkan sentimen anti-komunisme. Lembaga pendidikan bertindak sebagai mesin reproduksi ideologi negara melalui kurikulum yang terpusat, di mana sejarah peristiwa 1965 dikonstruksi secara tunggal. Melalui buku teks sekolah dan doktrinasi harian, negara menanamkan identifikasi bahwa "Komunisme" adalah lawan absolut dari "Pancasila", sehingga siswa menerima narasi tersebut sebagai pengetahuan objektif tanpa ruang kritik. Pendidikan formal menciptakan apa yang disebut Gramsci sebagai "kesadaran massa" yang patuh, di mana setiap pemikiran kritis atau kiri secara otomatis diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa.

Sejalan dengan pendidikan, institusi agama memainkan peran krusial sebagai instrumen legitimasi moral. Agama digunakan untuk memberikan dasar metafisik bagi sentimen anti-komunisme dengan melabeli ideologi kiri sebagai paham "atheis" yang bertentangan dengan fitrah manusia Indonesia yang religius. Melalui mimbar-mimbar keagamaan, sentimen ini disosialisasikan hingga ke akar rumput, mengubah penolakan terhadap komunisme dari sekadar sikap politik menjadi kewajiban iman. Hal ini menciptakan konsensus sukarela (*consent*) yang sangat kuat, karena masyarakat merasa bahwa dengan mendukung kebijakan anti-komunisme negara (seperti TAP MPRS No. XXV/1966), mereka tengah membela eksistensi agama mereka sendiri. Kombinasi antara pendidikan dan agama inilah

yang memperkokoh hegemoni Orde Baru, menjadikannya tak tergoyahkan karena telah berakar dalam "akal sehat" (*common sense*) religius dan intelektual masyarakat. Dalam kerangka ini, Gramsci memperkenalkan konsep intelektual tradisional, yaitu aktor-aktor sosial yang umumnya dianggap netral, namun dalam praktiknya kerap melanggar status quo, ia berperan menyebarkan ideologi kelas penguasa. Mereka tidak selalu berasal dari kalangan akademisi, tetapi juga tokoh agama, jurnalis, seniman, atau birokrat yang berfungsi membangun kesadaran kolektif sesuai arah kepentingan dominan. Para intelektual organik berfungsi sebagai penghubung antara ideologi penguasa dan kesadaran masyarakat (Femia, 1981). Melalui wacana publik, pendidikan, dan produksi pengetahuan, mereka menanamkan nilai-nilai dominan hingga diterima secara alami sebagai "kebenaran" bersama.

Selain itu, Gramsci juga menekankan pentingnya peran budaya dan bahasa dalam pembentukan hegemoni. Bagi Gramsci, bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga medium ideologis yang dapat mengonstruksi cara berpikir. Dominasi ideologis tercermin dalam bagaimana istilah dan simbol tertentu dimaknai secara sepihak untuk melanggar kepentingan penguasa (Forgacs, 2000). Misalnya, dalam konteks politik Indonesia pasca-TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, istilah seperti "nasionalisme", "stabilitas", dan "bahaya laten komunisme" menjadi bagian dari wacana hegemonik yang membentuk kesadaran politik masyarakat. Hegemoni bersifat dinamis dan tidak pernah mutlak. Ia bisa mengalami krisis ketika kelas dominan gagal mempertahankan legitimasi moral dan intelektualnya. Krisis hegemoni muncul saat masyarakat mulai mempertanyakan nilai-nilai dan narasi yang dianggap wajar. Pada titik ini, terbuka peluang bagi munculnya ideologi tandingan (*counter-hegemony*) yang menantang tatanan yang mapan (Mouffe, 1979). Oleh karena itu, perjuangan politik dalam pandangan Gramsci tidak hanya berlangsung di ruang negara, tetapi juga di ruang budaya dan ideologis tempat perebutan makna, nilai, dan kesadaran sosial berlangsung secara terus-menerus.

Dalam konteks penelitian "Dampak TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 terhadap Gerakan Kiri dan Hilangnya Orientasi Ideologis Partai Politik di Indonesia", teori hegemoni Gramsci memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kekuasaan pasca-1966 tidak hanya dibangun melalui represi politik, tetapi juga melalui dominasi ideologis yang lebih halus. Pelarangan komunisme yang berdampak pada segala bentuk ideologi kiri bukan sekadar tindakan hukum, melainkan bagian dari proses hegemonisasi kesadaran masyarakat. Negara menanamkan nilai-nilai nasionalisme tunggal dan anti-komunisme melalui sistem pendidikan, media massa, serta wacana budaya, sehingga ideologi alternatif dianggap berbahaya, menyimpang, dan bertentangan dengan moral nasional (Patria & Arief, 1999). Proses hegemonisasi ini berimplikasi langsung terhadap orientasi partai politik di Indonesia. Partai-partai yang sebelumnya berakar pada ideologi tertentu baik nasionalis, religius, maupun sosialis perlahan kehilangan basis ideologinya dan berubah menjadi alat kekuasaan yang pragmatis. Politik tidak lagi

dipahami sebagai perjuangan ide, melainkan sebagai arena kompetisi kekuasaan. Akibatnya, negara berhasil menciptakan hegemoni anti-ideologi, di mana stabilitas dan kesatuan nasional diposisikan sebagai nilai tertinggi yang tidak boleh diganggu oleh perbedaan pandangan. Perspektif Gramsci membantu menafsirkan kondisi ini sebagai bentuk keberhasilan hegemoni negara: kekuasaan yang tidak hanya memaksa, tetapi membuat masyarakat secara sukarela menerima dan mereproduksi nilai-nilai dominan yang menyingkirkan politik ideologis.

Dengan demikian, teori hegemoni Gramsci relevan untuk menjelaskan proses depolitisasi ideologis pasca-1966. Ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan beroperasi tidak hanya dalam ranah hukum atau militer, tetapi juga dalam ranah budaya, pendidikan, dan wacana publik. Kekuasaan negara menjadi kuat karena berhasil menanamkan ideologi yang membuat masyarakat percaya bahwa tidak ada alternatif selain tatanan yang ada. Dalam konteks ini, TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dapat dipahami bukan hanya sebagai keputusan politik, tetapi sebagai instrumen hegemonik yang berhasil membentuk kesadaran politik nasional berdasarkan prinsip kesatuan dan stabilitas, bukan pada perbedaan ideologi.

1.5.3 Kerangka Pikir

Peristiwa G30S 1965 menjadi titik balik dalam arah politik dan ideologi Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berusaha memperoleh legitimasi politik dan ideologis dengan membangun narasi anti-komunisme. Untuk memperkuat legitimasi itu, lahirlah TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang secara hukum melarang ajaran dan organisasi berhaluan Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketetapan ini menjadi dasar bagi pembentukan struktur kekuasaan baru yang menyingkirkan pengaruh ideologi kiri serta menegaskan arah politik Indonesia ke dalam satu kerangka ideologis yang dianggap aman dan sesuai dengan kepentingan negara.

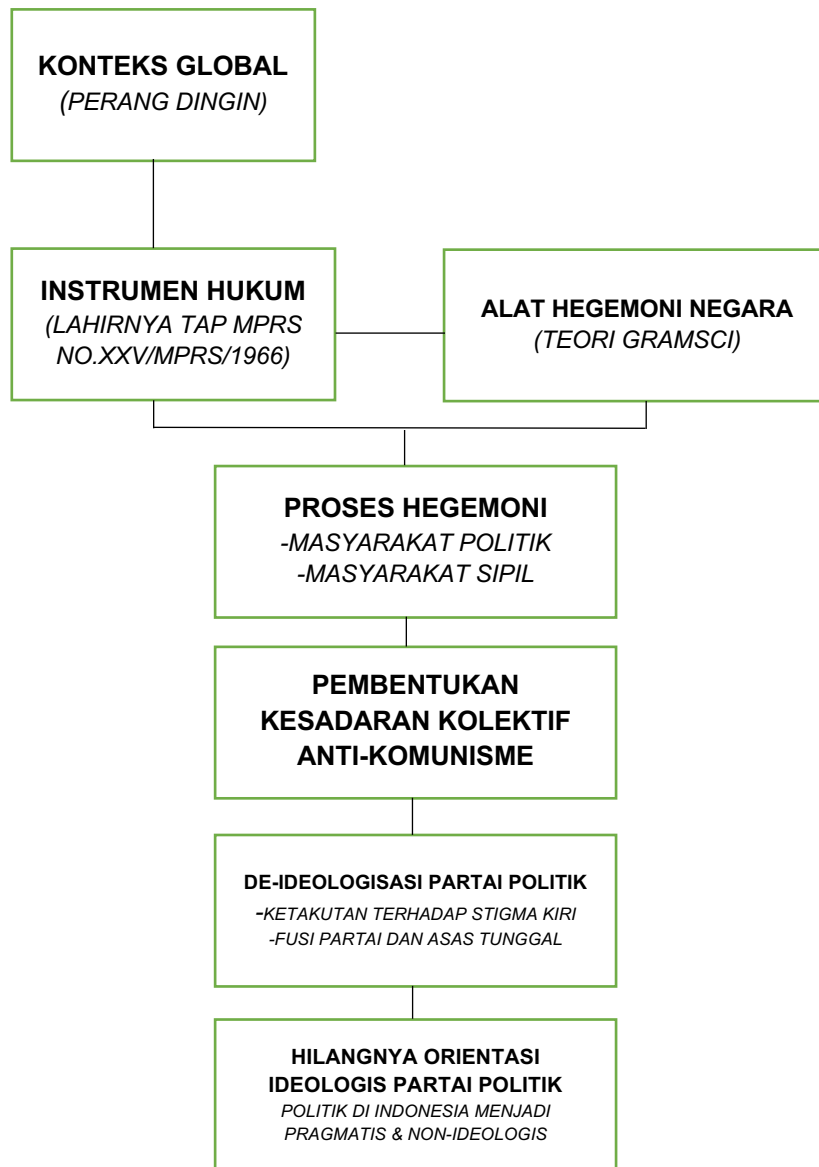
Berdasarkan teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan (coercion), tetapi juga melalui penciptaan persetujuan (consent) di masyarakat. Dalam konteks Indonesia pasca-1966, TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 berfungsi sebagai alat hegemonik negara untuk menanamkan ideologi tunggal, yakni nasionalisme dan anti-komunisme. Melalui kontrol terhadap institusi seperti pendidikan, media, agama, dan budaya populer, negara membentuk kesadaran publik bahwa anti-komunisme identik dengan moralitas dan nasionalisme. Dengan demikian, penolakan terhadap komunisme tidak hanya menjadi sikap politik, tetapi juga nilai sosial yang dianggap benar dan wajib dipatuhi.

Proses pembentukan hegemoni Orde Baru berjalan melalui dua ranah sebagaimana dijelaskan oleh Gramsci, yaitu masyarakat politik dan masyarakat sipil. Negara mendefinisikan batas kebenaran ideologis bahwa hanya Pancasila yang sah

sebagai dasar berpikir dan berpolitik. Melalui masyarakat politik yang mencakup negara, hukum, dan aparat, penguasa menggunakan kekuatan koersif untuk menekan oposisi ideologis. Sementara itu, melalui masyarakat sipil seperti lembaga pendidikan, media massa, dan institusi keagamaan, negara membangun konsensus sosial yang menyingkirkan ideologi alternatif. Dalam proses ini, intelektual tradisional seperti birokrat, akademisi, dan tokoh agama berperan penting dalam menyebarkan serta menormalkan wacana hegemonik tersebut.

Dampak dari hegemoni ini terlihat jelas pada dinamika partai politik Indonesia. Partai-partai di luar PKI seperti PNI dan partai-partai Islam mengalami tekanan ideologis yang besar. Ketakutan terhadap stigma kiri membuat partai-partai tersebut kehilangan identitas ideologisnya dan cenderung mengikuti narasi resmi tentang stabilitas nasional. Proses deideologisasi dan homogenisasi semakin menguat setelah diberlakukannya kebijakan fusi partai pada tahun 1973 dan penerapan Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1985. Akibatnya, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai wadah perjuangan ideologi, melainkan berubah menjadi alat kekuasaan yang bersifat pragmatis. Hegemoni anti-komunisme Orde Baru pada akhirnya tidak hanya membungkam gerakan kiri, tetapi juga menciptakan apa yang disebut sebagai “konsensus yang dipaksakan” atau *coerced consensus*. Masyarakat menerima dominasi ideologi negara bukan karena paksaan langsung, melainkan karena nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam kesadaran kolektif sebagai sesuatu yang wajar dan benar. Warisan deideologisasi ini masih terasa hingga kini, tercermin dalam praktik politik yang pragmatis dan minim perdebatan ideologis di antara partai-partai modern.

1.5.4 Skema Pikir



Gambar 1. 1Skema Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan tipe dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menetapkan Partai Politik sebagai lokasi penelitian utama yang bertindak sebagai unit analisis institusional. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada argumen bahwa partai politik merupakan "laboratorium gagasan" sekaligus aktor sentral yang mengalami dampak langsung dari pemberlakuan TAP MPRS No. XXV/1966. Secara spesifik, lokasi penelitian diarahkan pada struktur organisasi partai politik yang secara historis memiliki akar ideologi yang kuat, yakni kelompok partai nasionalis sebagai representasi pewaris ideologi PNI dan kelompok partai Islam sebagai pewaris spektrum pemikiran keagamaan politik. Penentuan lokasi pada entitas partai politik ini bertujuan untuk membedah bagaimana mekanisme hegemoni negara bekerja di dalam ruang internal organisasi, yang memaksa terjadinya proses de-ideologisasi dan perubahan orientasi dari agen ideologis menjadi mesin pragmatis.

2.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif historis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggambarkan, menceritakan, dan menganalisis secara sistematis peristiwa masa lalu guna memahami fenomena yang terjadi pada masa kini. Dalam konteks ini, metode deskriptif historis memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi secara faktual dan akurat dinamika ideologis serta kebijakan politik pasca-TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia. Melalui tipe penelitian ini, peneliti tidak hanya menjelaskan tentang "apa" yang terjadi dalam lintasan sejarah politik Indonesia, tetapi juga mengupas secara mendalam tentang "bagaimana" mekanisme ideologis negara bekerja melalui kebijakan hukum dan sosial-budaya dari waktu ke waktu.

Dasar penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada penelusuran makna, interpretasi, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif-historis dipilih untuk memahami fenomena hegemoni negara dan hilangnya orientasi ideologis partai politik dari perspektif konseptual dan teoretik, terutama melalui kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci. Pilihan metodologis ini memungkinkan peneliti untuk melakukan studi kritis terhadap dokumen sejarah, risalah kebijakan, dan catatan internal partai

guna menemukan keterkaitan antara kekuasaan, ideologi, dan perubahan struktur sosial. Dengan menggunakan gabungan tipe deskriptif historis dan dasar kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang kaya mengenai bagaimana kekuasaan bekerja melalui proses hegemonik yang berkesinambungan, sekaligus memberikan kontribusi teoretis terhadap studi politik dan ideologi di Indonesia kontemporer.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara sistematis guna mendukung kedalaman analisis deskriptif historis melalui pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber yang memberikan informasi otoritatif dan tangan pertama terkait objek kajian, yang terdiri atas dokumen resmi dan arsip historis seperti naskah asli TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, risalah sidang umum MPRS 1966, serta dokumen internal organisasi partai politik meliputi AD/ART, manifesto politik, dan program kerja partai pada periode awal Orde Baru hingga proses fusi partai 1973.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui studi literatur mendalam guna membangun kerangka konseptual dan historis yang kokoh. Sumber data sekunder ini meliputi literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang membahas teori hegemoni Antonio Gramsci, sejarah politik Indonesia pasca-1965, gerakan kiri, serta proses de-ideologisasi partai politik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan publikasi ilmiah, arsip media massa kontemporer, dan karya teoretis utama Antonio Gramsci mengenai hegemoni, masyarakat sipil, dan intelektual organik sebagai pisau analisis untuk membedah instrumen hukum TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Seluruh data yang dikumpulkan dari kedua sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk mengungkap hubungan kausalitas antara kebijakan negara, konstruksi hegemoni ideologis melalui institusi pendidikan dan agama, hingga bermuara pada hilangnya pluralisme ideologis dalam politik Indonesia.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Studi Literatur

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menitikberatkan sepenuhnya pada kekuatan data dokumenter dan historis guna mendukung kedalaman analisis kualitatif melalui metode deskriptif historis. Teknik utama yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis secara kritis berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi kuat dengan diskursus TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 serta fenomena de-ideologisasi partai politik. Penggunaan studi literatur sebagai pilar utama didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menelusuri jejak-jejak kebijakan, narasi sejarah, dan konstruksi wacana anti-komunisme yang telah dilembagakan dalam struktur sosial-politik Indonesia. Data primer yang dihimpun melalui teknik ini mencakup dokumen hukum resmi, risalah sidang MPRS, serta dokumen internal partai politik seperti AD/ART dan manifesto politik periode 1966-1973. Selain itu, peneliti mengkaji karya teoretis fundamental Antonio Gramsci mengenai hegemoni, jurnal ilmiah, buku sejarah politik, serta arsip media massa guna menggali data konseptual dan empiris yang mampu menjelaskan relasi antara kebijakan negara dengan hilangnya pluralisme ideologis di Indonesia.

2.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Model ini melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif berbasis studi literatur, di mana proses analisis dilakukan secara simultan dan reflektif terhadap berbagai sumber pustaka, dokumen, serta data wawancara (jika dilakukan).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang meliputi kegiatan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, reduksi dilakukan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan arsip media yang berkaitan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, serta dinamika ideologi politik pasca-1966. Tujuan reduksi ini adalah memastikan bahwa hanya data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian yang dipertahankan untuk tahap analisis berikutnya.

2. Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan dominan berbasis literatur, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel konseptual, serta kutipan dari sumber-sumber akademik yang relevan. Peneliti akan menampilkan hubungan antara konsep hegemoni, kebijakan ideologis negara, dan dampaknya terhadap orientasi ideologis partai politik di Indonesia. Penyajian data ini berfungsi untuk menampilkan pola-pola dan hubungan makna yang muncul dari hasil analisis literatur.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Proses ini tidak bersifat linier, tetapi berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian. Kesimpulan akan diverifikasi melalui pembacaan ulang sumber literatur dan perbandingan antar data untuk memastikan konsistensi dan validitas interpretasi. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana negara menggunakan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sebagai instrumen hegemoni ideologis dan bagaimana proses tersebut memengaruhi hilangnya orientasi ideologis partai politik di Indonesia.